

BAB I

1.1.Latar Belakang

Akhir-akhir ini sampah menjadi salah satu permasalahan di Provinsi Yogyakarta. Sampah tidak akan berhenti dan akan terus diproduksi selama manusia masih tetap ada. Permasalahan pada sampah termasuk sesuatu yang krusial atau merupakan masalah kultural karena berpengaruh dari beraneka ragam sisi sudut dalam kehidupan. Terutama terjadi pada kota besar, seperti kota Yogyakarta, Semarang, dan Jakarta. Disisi lain, permasalahan sampah hingga tahun 2020 , banyaknya sampah yang dihasilkan di perkotaan Indonesia akan meningkat lima kali lipat. Permasalahan sampah sudah menjadi bagian dari konsekuensi hidup. Peningkatan volume sampah di perkotaan sudah menimbulkan permasalahan lingkungan. Banyaknya permasalahan yang ditimbulkan dari sampah seperti bau busuk, pemandangan tak sedap, sampah juga berbahaya bagi kehidupan karena mengancam kesehatan publik mulai dari mencemari air, polusi udara, menghambat berbagai kegiatan dan merusak fasilitas kota yang sudah ada. Undang-undang RI No 18 tahun 2018 menjelaskan tentang pengelolaan sampah dan definisi sampah merupakan sisa sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang memiliki bentuk padat. Sumber berasal dari berbagai sumber seperti rumah tangga, pasar, toko-toko, taman, dan tempat umum lainnya. Sampah ini kemungkinan mengandung zat-zat atau cairan berbahaya seperti sisa baterai, minyak, limbah pabrik, sisa biosida tanaman dan lain sebagainya. Penggolongan sampah di Indonesia yang sering digunakan ialah seperti dedaunan, ranting kayu, kertas ataupun karton, sisa-sisa makanan ternak,sayur,buah kategori ini termasuk sampah yang organik. Selain itu ada sampah anorganik yang terdiri seperti plastik,kaleng, gelas dan logam-logam lainnya.

Hal diatas memberikan sebuah terobosan yaitu bentuk kerjasama dalam pengelolaan sampah dan tidak hanya itu saja melainkan juga sarana dan prasarana

lainnya yang berada di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Kerja sama pada saat ini sudah tidak asing lagi pada dunia pemerintahan atau non pemerintahan. Bentuk kerjasama ini telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta Nomor 119/03441/2019, Nomor 59/PK/Bt/2019, Nomor 68/PK.KDH/A/2019, dan Nomor 64/PKS.YK/X/2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional Di Wilayah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Banyaknya permasalahan publik pada saat ini tidak selalu dapat diselesaikan secara individu oleh pemerintah. Kerja sama ialah sebuah bentuk pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang tidak melihat dari salah satu sudut pandang saja. Kerja sama dalam pemerintah dibutuhkan pada setiap peningkatan pelayanan publik yang terjadi pada antardaerah atau yang melibatkan lebih dari satu daerah. Hal ini memiliki tujuan agar saling berkoordinasi dan saling mengetahui kebutuhan dan permasalahan sampah di daerahnya agar dapat dibantu oleh daerah lain yang berada dalam kerja sama. Saat ini permasalahan sampah merupakan salah satu permasalahan yang besar dimana dalam penganganannya proses pengelolaan sampah saat ini kurang efektif dan efisien. Seperti yang dilakukan di DI Yogyakarta dimana dalam permasalahan sampah membentuk sebuah kerjasama yang dikoordinasi oleh Sekretariat Bersama. Dalam permasalahan pengelolaan TPA Piyungan ini mengalami degradasi dimana sering kali mengharuskan gubernur DI Yogyakarta untuk turun tangan. Karena perlunya penanganan yang lebih cepat, kebijakan Pemda DIY juga tidak cukup mendukung sehingga implementasi di lapangan kurang optimal, Pemda DIY juga tidak secara konkret mengatur dalam regulasi dan kebijakan daerah tentang batasan waktu penutupan TPST dengan sistem pembuangan terbuka. Padahal menurut Pasal 44 UU Nomor 18 Tahun 2008 membatasi maksimal

lima tahun tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan terbuka sudah harus ditutup (iNews, 22/12/20).

Dalam sejarah pengelolaan TPA Piyungan, tempat ini dikelola dengan kerjasama yang dibentuk menjadi Kartamantul. Sekretariat Bersama (Sekber Kartamantul) Yogyakarta, Sleman, dan Bantul merupakan bentuk kerja sama yang memiliki tugas dalam pengawasan pengelolaan sampah pada tingkat provinsi yang menjalin kerja sama dengan BLH di kota atau kabupaten. Pengawasan yang diusahakan mulai dari pemungutan retribusi, pemungutan dari sumbernya untuk dibawa ke TPS sampah. Dalam penelitian ini menemukan beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat. Bantul dipilih sebagai letak TPA untuk kota Yogyakarta, Sleman dan Bantul karena sebagian kota Bantul adalah pedesaan yang mana masih memiliki lahan yang masih luas. Kerja sama antar wilayah secara resmi diatur oleh Undang- Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Wilayah pasal 87 ayat 1– 4. Dorongan kerja sama tersebut menjadi kuat sesudah diundangkannya Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2007 tentang tata cara penerapan kerja sama wilayah, eksklusifnya Pasal 4 yang mengendalikan tentang layanan publik, ialah layanan yang diadakan oleh pemerintah kepada warga antara lain dalam perihal penyediaan sarana kesehatan, pembelajaran, pengelolaan air bersih, pasar, perumahan, perparkiran serta persampahan. Peraturan Pemerintah inilah yang digunakan oleh sebagian wilayah untuk melaksanakan kerjasama pengelolaan sampah antar wilayah. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana strategi Kartamantul sebagai bentuk kerjasama antar kabupaten/kota dalam menangani dan mengelola sampah. Berikut data pengelolaan sampah DIY:

Tabel 1. 1 Data Pengelolaan Sampah Tahun 2017-2021

No	Bidang Urusan	Elemen	Tahun					2021	Satuan	Periode	Pengentri
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Pekerjaan Umum	Jumlah TPS	419,00 0	287,00	287,00	565,00	-	Unit	-	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber daya mineral	
2	Pekerjaan Umum	Data Tampung TPS	500,00	600,00	600,00	0	-	Ton	-	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber daya mineral	
3	Pekerjaan Umum	Jumlah Depo Sampah	64,00	73,00	73,00	0	-	Unit	-	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber daya mineral	
4	Pekerjaan Umum	Jumlah TPA	3,00	3,00	3,00	3,00	-	Unit	-	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber daya mineral	
5	Pekerjaan Umum	Jumlah TPST	61,00	61,00	61,00	57,00	-	Unit	-	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber daya mineral	
6	Pekerjaan Umum	Volume sampah	549,74	583,80	583,80	772,72	-	Ton/hari	-	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan	

		yang ditangani								Energi Sumber daya mineral
7	Pekerjaan Umum	Volume Produksi Sampah	659,69	644,69	644,69	1.451,00	-	Ton/har i	-	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber daya mineral

*Tetap *Sangat Sementara *Sementara

Sumber: Bappeda DIY

Sistem yang dilakukan dalam pengelolaan sampah yaitu menggunakan sistem *semi control landfill* atau *partially controlled landfill* hal ini bisa dilihat karena TPA Piyungan yang tidak selalu melakukan penimbunan. Namun, hal ini lebih menuju pada penumpukan sampah di area terbuka namun tidak menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dimana hal tersebut memberi dampak pula bagi masyarakat sekitar. Ombudsman RI Perwakilan DIY menemukan bahwasanya yang terjadi dilapangan dalam prakteknya untuk mengelola sampah di TPA Piyungan ialah menggunakan metode *open dumping* dimana dalam metode ini, sampah hanya dibuang begitu saja tanpa pengelolaan lebih lanjut. Pada bulan maret tahun 2019 warga sekitar melakukan demo hingga mengakibatkan sampah menumpuk dan terjadi antrian truck sepanjang setengah kilometer. Hal ini terjadi karena warga meminta perbaikan jalan, penerangan jalan, dan pembuatan drainase agar air lindi tidak masuk ke dalam sumur mereka. Sayangnya, sudah terdapat dusun yang airnya memiliki kategori tidak layak konsumsi yaitu pada dusun Nglengkong, Ngablak dan Banyakan III (Suarajogja,11/09/20). Keadaan TPA Piyungan saat ini memang sudah dikatakan. Hal tersebut terjadi karena memiliki sebab pada harinya sampah yang diterima oleh TPA Piyungan mencapai 1683 ton/hari (Omdusman,28/04/20). Permasalahan lain yang menimbulkan kurangnya

pengelolaan sampah yang terjadi di TPA Piyungan ialah, kurangnya kualitas teknologi yang tinggi, dimana hal ini menghambat proses pengelolaan sampah. Seperti yang terjadi pada bulan April 2020, TPA Piyungan ditutup selama kurang lebih 3 hari karena adanya kerusakan alat berat (Okezone,08/04/20). Pada tahun 2018 dalam sisi anggaran sebesar RP 8.700.000.000 telah di berikan oleh Pemerintah DIY dimana hal ini menjadikan pengelolaan sampah di TPA Piyungan belum maksimal (Ombusman. 28/04/20). Penjelasan yang diberikan oleh KASI Pengelolaan dan Pemrosesan Sampah pada Balai TPST Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, menjelaskan bahwa metode atau sistem *open dumping* digunakan karena terbatasnya anggaran yang tersedia karena dalam menimbun sampah harus memerlukan pasir. Permasalahan lain yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yaitu kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat terkait pemilahan dan pengurangan sampah (Ombusman,28/04/20). Maka dari itu penelitian ini dimaksudkan guna mengetahui bagaimana bentuk kerja sama Kartamantul yang dilakukan oleh Yogyakarta, Sleman, Bantul untuk mengelola sampah di TPA Piyungan tahun 2020 dan untuk melengkapinya penelitian ini juga mencari lebih dalam terhadap apa saja dampak yang ditimbulkan dari TPA Piyungan terhadap masyarakat sekitar.

1.2.Rumusan Masalah

Dengan latar belakang tersebut terdapat beberapa masalah mengenai masih kurangnya pengelolaan sampah yang dilakukan untuk menekan penumpukan sampah pada TPA Piyungan. Dengan demikian rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana praktik collaborative governance yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta dalam pengelolaan sampah di TPA Piyungan?

- b. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari TPA Piyungan terhadap masyarakat sekitar?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan tujuan penelitian agar kegiatan penelitian memiliki arah yang jelas dan menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan. Maka dari itu tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana praktik collaborative governance yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengolahan terhadap sampah yang ada di TPA Piyungan.

1.4. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini memiliki manfaat yang baik secara praktis dan teoritis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan adanya penelitian ini dapat diharapkan sebagai saran dan acuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mengelola sampah di TPA Piyungan dan mengembangkan Lembaga Swadaya Masyarakat yang turut membantu memonitoring dan mengevaluasi pengelolaan sampah.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat umum dengan menambah informasi dan wawasan pengelolaan sampah, bahaya sampah dan pemanfaatan sampah
- b) Diharapkan pula menjadi acuan untuk mahasiswa atau pelajar melakukan penelitian selanjutnya
- c) Sebagai perbandingan antara teori-teori yang direncanakan dengan realita yang terjadi di lapangan.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang berkaitan dengan bagaimana dalam mengelola sampah di Tempat Pembuangan Akhir dapat dipetakan/dikategorikan sebagai berikut:

Mulasari et al., (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Domestik Di Kabupaten Bantul Provinsi D.I.Yogyakarta dan Damanhuri, Enri & Padmi, (2011) dalam penelitian dengan judul Pengelolaan Sampah ini sama-sama terkait bagaimana pengelolaan sampah, kedua penelitian menghasilkan bahwasanya terdapat enam teknik untuk mengelola sampah yaitu meliputi: pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah, pembuangan akhir sampah.

Prameswari et al., (2013) yang berjudul Kerja Sama Antardaerah Dalam Sektor Persampahan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan (Studi di Sekretariat Bersama Kartamantul, DI Yogyakarta) menegaskan bahwa tugas pokok yang dijalankan Sekretariat Bersama Kartamantul yaitu koordinasi, fasilitasi, mediasi, monitoring dan evaluasi. Dalam menjalankan kerja sama antar daerah untuk mengelola sampah harus mencakup indikator pembangunan berkelanjutan seperti meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan pada bidang ekonomi masyarakat hingga menaikkan kualitas pada lingkungan.

Dalam pengelolaan sampah, pastilah membutuhkan beberapa strategi seperti yang dilakukan oleh Bahri, (2015) dengan judul Strategi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman (DKPP) di Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa dalam strategi ini DKPP dengan cara membentuk sebuah kelompok yang non-pemerintah yang peduli terhadap sampah dan membuat TPST untuk dikelola menjadi kompos atau

residu. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Winahyu et al., (2019) yang berjudul Strategi Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang dimana dalam pengelolaan ini TPA Bantargebang lebih memilih menggunakan sanitary landfill namun cenderung beralih ke open dumping dimana hal ini hanya membuang sampah tanpa dicerna. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kosmanto et al., (2012) dalam Strategi Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2012 peneliti dengan Analisis SWOT dimana penelitian ini merekomendasikan strateginya dalam pengoptimalisasian pengelolaan sampah untuk menggunakan Strategi S-O (Strength-Opportunity) yaitu dengan memanfaatkan segala kekuatan yang ada pada dukungan Pemerintah.

Dalam segala bentuk pengimplementasian kebijakan atau peraturan yang ada pastilah tersimpan kendala kendala tersendiri dalam menjalankannya. Said et al., (2015) meneliti terkait Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota BauBau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala dalam pengimplementasiannya yaitu berupa sumber daya manusia yang masih terbatas hingga hal ini berdampak pula pada pencapaian programnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Yulistia et al., 2015) menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah kota semarang menurut perda nomor 6 tahun 2012 memiliki kendala tersendiri yaitu, kurang optimalnya pada proses pengangkutan dimana dari produksi harian sampah mencapai 800 ton/hari hanya sekitar 750 ton/perhari yang dapat diangkut ke TPA. Mayangkara, (2016) dalam penilaian yang diberikan pada kebijakan pengelolaan sampah yang ada di TPA Gunung Panggung

Kabupaten Tuban menghasilkan beberapa keterbatasan dalam pelaksanaan pengelolaan. Diantaranya seperti, kurangnya jumlah SDM yang tersedia untuk mengelola TPA, kurangnya regulasi peraturan guna mendukung kebijakan pengelolaan sampah hingga terbatasnya anggaran yang tersedia.

Sulistyaningsih, (2016) meneliti tentang respon masyarakat desa sitimulyo terhadap pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah (TPA) Piyungan Bantul. Penelitian ini menghasilkan beberapa respon dari masyarakat. Terdapat masyarakat yang memberi respon baik terhadap adanya TPA ini karena biasanya mereka diberikan keuntungan dari segi ekonomi. Sedangkan mereka yang menolak adanya TPA ini biasanya tidak mendapatkan keuntungan ekonomi disisi lain juga kurangnya air bersih, udara yang bersih.

Adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh (Dwiyanto, 2011) tentang model peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan sinergi dalam pengelolaan sampah perkotaan bahwasanya diperlukan sebuah rencana tindak atau *action plan* diantaranya yaitu 1) Melaksanakan beberapa pengenalan karakteristik sampah dan bagaimana metode pembuangannya, 2) Merencanakan atau menyusun dan mengimplementasikan pengelolaan persampahan secara terpadu (pengumpulan, pengangkutan, hingga pembuangan akhir, 3) Membagi antara peran pengaturan dan pengawasan dari lembaga yang ada dengan fungsi operator pemberi layanan guna memberi ketegasan dalam melaksanakan *reward & punishment* dalam memberikan pelayanan, 4) Memberikan dorongan lebih terhadap program *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3 R) guna mencapai program waste pada masa yang akan datang 5) Melakukan pembaharuan terhadap stuktur tarif dengan

menerapkan prinsip pemulihan biaya atau *full cost recovery*, 6) Mengembangkan teknologi pengelolaan sampah yang lebih bersahabat dengan lingkungan dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi bahan buangan. Dengan paradigma “membuang sampah” dengan kata lain hanya memindahkan sampah diubah menjadi “mengelola sampah” dimana dalam praktiknya melakukan pemilahan sampah agar mereduksi secara signifikan timbulan sampah yang dibuang.

Sedangkan dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan seperti yang dibahas oleh (Puspa et al., 2017) dimana dalam keberlanjutan pengelolaan sampah dapat dicapai dengan menerapkan optimalisasi daur hidup sampah mengguakan pengelolaan sampah yang terintegrasi melalui metode *life pcycle inventory*. Dalam metode ini dilakukan dengan memanfaatkan sampah melalui unit pengelolaan sampah atau UPS serta peran masyarakat. Dalam pemanfaatan ini sampah yang dihasilkan oleh setiap rumah tangga maupun kawasan komersial tidak secara langsung masuk ke TPA, akan tetapi dimanfaatkan dahulu melalui UPS Kompos, TPST – 3R, serta RDF (*Refuse Derived Fuel*). Metode ini dapat mengurangi sampah yang masuk ke TPA Muara Fajar 2 menjadi berkurang sekitar 8,9%. Sehingga akan menambah usia TPA Muara Fajar 2 yang semula 1,5 tahun menjadi 6 tahun.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mahyudin, 2014) yang berjudul strategi pengelolaan sampah berkelanjutan, peneliti ini menghasilkan bahwa saat ini pemerintah sedang berusaha melakukan inovasi ke arah perbaikan pengelolaan TPA seperti mengembangkan teknologi *landfilling*, teknologi pengolah sampah, melakukan kerjasama dengan swasta, adapun kendala utama yang terjadi yaitu terbatasnya biaya.

Sedangkan permasalahan utama sampah diantaranya permasalahan paradigma, kesadaran hingga perilaku. Saat ini perhatian utama tertuju kepada terbentuknya karakter manusia yang tidak peduli dengan sampah dimanjakan pemerintah, dan tidak bertanggung jawab atas sampah.

Dalam setiap pengelolaan TPA pastinya setiap daerah memiliki kewenangan dan kebijakannya masing-masing, seperti yang dilakukan di Tambakrejo. Adapun penelitian terkait yaitu menurut (Amelinda & Kriswibowo, 2021) tentang collaborative governance in waste management (study in the integrated waste management site of Tambakrejo penelitian ini menjelaskan bahwa tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah di TPST Kawasan Tambakrejo yang dilakukan antara Lingkungan dan Kebersihan Dinas Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Desa Tambakrejo, KSM Guna Lestari, PT. Pondok Tjandra Indah bisa dikatakan cukup optimal. Hal ini karena proses tata kelola kolaboratif telah ditetapkan dan berjalan sebagai dibuktikan dengan adanya 1) Kondisi awal terbentuknya kolaborasi menimbulkan insentif untuk memecahkan masalah yang ada, menyebabkan pemangku kepentingan untuk memiliki komitmen yang kuat terhadap proses kolaborasi, 2) kepemimpinan fasilitatif hanya didominasi oleh satu aktor kolaboratif, 3) The desain kelembagaan di kawasan TPST Tambakrejo belum sempurna, 4) Tatap muka forum dialog diadakan melalui musyawarah rutin, 5) Membangun kepercayaan terhadap masyarakat masih kurang 6) Komitmen terhadap proses stakeholder kuat, 7) pemahaman dengan masyarakat dalam pengelolaan sampah masih kurang, 8) hasil sementara yang diperoleh adalah bahwa tujuan dari kerjasama telah tercapai namun masih terdapat kendala dan keluhan dari masyarakat.

Dalam setiap kebijakan yang diambil atau keputusan yang diambil pemerintah perlu melakukan evaluasi kebijakan dengan rutin, hal ini telah dibahas melalui penelitian yang dilakukan oleh (Yulida et al., 2019) yang berjudul evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir kelurahan Batu Layang kecamatan Pontianak Utara dengan metode penelitian eksploratif kualitatif menghasilkan bahwa dalam pengelolaan sampah belum diterapkan atau belum memenuhi aturan dan kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsitas. Banyaknya sampah yang masuk ke TPA belum ditangani dengan benar karena disebabkan kurangnya anggaran yang disediakan dalam menangani sampah, terbatasnya ahli teknis, sarana dan prasarana yang kurang memadai hingga kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah.

Persamaan dalam jurnal dan tema yang penyusun angkat adalah bagaimana mengelola sampah yang baik. Dalam tema kami maupun 15 jurnal yang ditemukan ialah Pengelolaan sampah, terutama bagaimana strategi sampah itu dijalankan dalam mengelola sampah. Karena mengingat fasilitas TPA Piyungan yang diberikan pemerintah sangatlah memprihatinkan, walaupun sudah tersedia tetapi kualitas yang diberikan kurang memadai bagi masyarakat sekitar.

Perbedaan yang terkandung dalam penelitian ini penyusun ingin melihat apakah dalam *collaboratie governance* yang dijadikan strategi pemerintah telah berjalan dengan semestinya di lapangan. Dari infrastruktur yang tersedia, kualitas lingkungan beserta bagaimana masyarakat menghadapi keberadaan TPA Piyungan. Dan juga ingin melihat apakah sebelumnya sudah memiliki dampak terhadap masyarakat di area sekitar TPA Piyungan.

1.6.Landasan Teori

1.6.1. Kerangka Teori

Kerangka teori sangat diperlukan dalam melakukan kegiatan penelitian, karena didalamnya mengandung teori-teori. Penelitian merupakan kegiatan yang harus memiliki kegiatan yang jelas, sistematis, dan ilmiah. Kita perlu memberikan penjelasan-penjelasan yang di penelitian ini, hal ini guna memperoleh penafsiran terhadap istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, berikut penjelasannya :

a. Collaborative Governance

Collaborative governance adalah pengaturan di mana, dalam proses pengambilan keputusan kolektif formal, berorientasi konsensus dan berorientasi negosiasi yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola prosedur atau aset publik, satu atau lebih pemangku kepentingan non-publik terkait langsung pengawasan oleh lembaga publik (Ansell & Gash, 2008).

Collaborative governance merupakan sebuah strategi baru dari pemerintahan yang berkolaborasi dengan melibatkan *stakeholders* atau dengan mereka yang memiliki kepentingan yang sama dalam sebuah forum dengan pemerintah untuk membuat suatu keputusan bersama. Irawan menjelaskan bahwa sebuah *collaborative governance* merupakan pengaturan pemerintahan yang melibatkan satu atau lebih lembaga publik dan non-pemerintahan yang memiliki kepentingan secara langsung untuk mengambil keputusan yang memiliki sifat formal, dan berorientasi pada konsensus deliberatif yang memiliki tujuan guna membuat serta melaksanakan kebijakan publik serta mengelola program hingga aset publik.

Menurut De Seve terdapat delapan item penting yang dijadikan tolak ukur keberhasilan sebuah *collaborative governance* yaitu:

1. Terdapat rasa saling percaya antar partisipan (*Trust among the participants*)

Hal ini didasarkan pada hubungan profesional atau sosial, di mana informasi tersebut terkandung dalam informasi atau keyakinan yang diperoleh peserta dalam jaringan dari pemangku kepentingan lain untuk mencapai tujuan bersama. Bagi instansi pemerintah sendiri, elemen ini sangat penting, karena mereka harus memastikan bahwa mereka memenuhi tugas legislatif atau regulasi, dan dapat memberikan kepercayaan kepada mitra yang tidak berada di dalam atau diluar pemerintahan untuk melakukan kegiatan yang disepakati bersama

2. Pembagian akuntabilitas

Saat menetapkan akuntabilitas dari berbagai tata kelola (seperti struktur, manajemen, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya), tetapkan pengambilan keputusan kepada semua anggota jaringan, dengan berbagi tanggung jawab dalam proses pencapaian akhir yang diharapkan. Namun, jika anggota tidak berpartisipasi dalam penentuan tujuan network dan tidak ingin membawa sumber daya dan izin ke network, maka network mungkin tidak dapat mencapai tujuannya.

3. Saling berbagi informasi (*information sharing*)

Dalam hal ini, dapat berupa akses yang mudah untuk anggota perlindungan privasi (privasi identitas pribadi) dan akses terbatas

untuk non-anggota, selama semua pihak menerimanya. Akses yang mudah dapat mencakup sistem, perangkat lunak, dan proses yang aman dan mudah untuk mengakses informasi

4. Governance

Terdapat kepastian dalam tata kelola diantaranya a) *boundary* dan *exclusivity* yang memberi penegasan atau kejelasan siapa saja yang masuk dalam jaringan dan siapa saja yang diluar jaringan b) *rules*, terdapat aturan yang memberikan batasan-batasan, dan menjelaskan apa saja yang harus dilakukan dan yang seharusnya tidak dilakukan c) *self determination* yaitu sebuah bentuk kebebasan untuk menentukan seperti apa saja *network* yang akan berjalan, atau bentuk sebuah kerjasama atau kolaborasi ditentukan melalui model kolaborasi yang diadopsi dan d) *network management* dimana hal ini memberi penegasan yang berkaitan dengan resolusi penolakan/tantangan. Alokasi sumberdaya, kontrol kualitas, dan pemeliharaan organisasi.

5. Akses terhadap kekuasaan (*access to authority*)

Dimana ketersediaan standar dalam ketentuan prosedur yang jelas dan diterima secara luas. Dan untuk kebanyakan network, network-network tersebut harus memberikan kesan pada salah satu anggota network guna memberikan otoritas untuk mengimplementasikan setiap keputusan atau menjalankan pekerjaan.

6. Jenis struktur jaringan (*networked structure*)

Hal ini berkaitan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain yang menyatu secara bersamaan dan mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani. Ada pula beberapa bentuknya yaitu *self governance*, *lead organization*, dan *network administrative organization*.

7. Komitmen terhadap tujuan (*commitment to a common purpose*)

Dalam hal ini lebih mengacu pada sebuah alasan mengapa suatu network atau jaringan harus ada. Alasan mengapa sebuah network harus ada ialah dikarenakan perhatian dan komitmen guna mencapai tujuan yang positif. Tujuan ini biasanya terartikulasikan di dalam misi umum suatu organisasi pemerintah.

8. Akses terhadap sumber daya (*Access to resources*)

Terdapat ketersediaan sumber keuangan, teknis, manusia dan sumberdaya lainnya yang diperlukan untuk mencapai network.

b. Ekologi Politik

a. Pengertian Ekologi Politik

Pada awalnya ekologi politik mulai berkembang pada tahun 1970an dan awal 1980an. Namun pada awalnya istilah ekologi politik telah digunakan oleh De Jouvenel pada tahun 1957 dalam artikelnya yang berjudul "*From Political Economy to Political Ecology*" bahwasanya ekologi politik merupakan studi mengenai penataan daya-daya politik dalam mengelola alam, dari segi sumber daya alam atau pun dalam objek yang terkena

dampak dari aktivitas manusia dalam kategori pembangunan ekonomi. Sedangkan menurut Hans Enzensberger (1974) dalam esai yang berjudul “*The Critique of Political Ecology*” memaparkan kritiknya terhadap ekologi politik bahwasanya hasil-hasil pembelajaran yang prihatin dan mengikutsertakan memperluas dan membesarnya gejala lingkungan. Robert Holsworth juga memaparkan kritiknya melalui “*Recycling Hobbes: The Limits to Political Ecology*” (1979) bahwa ekologi politik merupakan sebagai keprihatinan politik aktual terhadap lingkungan ataupun aktivitas lingkungan. Maka dari istilah Enzensberger dan Holsworth diatas bahwasanya walaupun dengan tidak secara penuh dapat menampung keberagaman pemahaman ekologi politik yang saat ini dimengerti, setidaknya mengandung aspek yang salah satunya ialah gerakan lingkungan serta kritik ekonomi yang terkandung dalam gagasan dan para aktivis ekologi bagi para pecinta lingkungan masih dapat ditemui dalam sebagian kepustakaan ekologi politik. Secara umum, ekologi politik terfokus pada pemahaman politik terhadap perubahan serta kerusakan pada lingkungan.

b. Pendekatan Ekologi Politik

Sebelum lebih jauh, pendekatan pada ekologi pada dasarnya memiliki dua pendekatan dimana pendekatan tersebut dibagi menjadi pendekatan aktor dan pendekatan kritis (Satria, 2015) yaitu:

a) Pendekatan Aktor

Pendekatan yang memiliki pusat pada pelaku atau *Actor Oriented – AO* yang selama ini telah digunakan oleh Bailey dan Bryant dalam buku *Third World Political Ecology* (2001) dimana pendekatan tersebut

memiliki tumpuan pada konsep *politicized environment* dimana hal ini mempunyai anggapan bahwasanya permasalahan lingkungan tidak dapat dipahami dengan terpisah bersama konsep politik serta ekonomi dimana permasalahan ini muncul. Maka, permasalahan lingkungan tidaklah hanya tentang permasalahan teknis. Pendekatan ini memiliki beberapa anggapan dasar yaitu:

- 1) Manfaat dan anggaran yang terlibat dengan perkembangan lingkungan yang hanya dinikmati segelintir aktor sehingga tidak menyebabkan pemerataan
- 2) Pengalokasian anggaran dan manfaat yang tidak secara merata dapat menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi
- 3) Dampak yang berasal dari sosial ekonomi yang tidak sama yang berasal dari perkembangan lingkungan juga memiliki keterkaitan politik dimana hal ini mengartikan bahwa terjadi pergantian kekuasaan antara hubungan satu aktor dengan yang lain.

Disisi lain aktor akar rumput atau *grass roots actors* adalah pihak yang memiliki kelemahan dalam *politicized environment*. Aktor ini sering kali melewati proses marginalisasi ataupun sensitif terhadap berbagai macam bentuk pada degradasi lingkungan yang memiliki sifat episodik atau sepanjang waktu. Hal ini disebabkan oleh aktor-aktor lain seperti pengusaha, negara ataupun MNC yang memiliki ketangguhan politik yang tidak kecil untuk menjaga pemanfaatan sumber daya alam.

b) Pendekatan Kritis

Pada analisis ekologi politik memiliki fokus pada permasalahan *domination of nature* yang memiliki keterikatan dengan pembahasan

kapitalisme dimana hal ini menjadi penyebab utama pada degradasi lingkungan. Sejak Tradisi Frankfurt dengan teori kritis, diskusi ini sudah berlangsung. Gambaran yang diberikan oleh Marcus dan Habermas ialah seperti apa sifat yang dimiliki manusia yang lebih banyak mengandung rasionalitas instrumental serta sifat eksploitasi oleh masyarakat yang lebih modern industrial. Menurut Marcuse manusia didominasi pada alam yang memiliki keterkaitan dengan alam dimana hal tersebut menunjukkan komoditi dan nilai tukar saja, oleh sebab itu dehumanisasi tidak dapat terhindar sama dengan bagaimana eksploitasi terhadap alam (Satria, 2015).

Kemudian gagasan diatas melalui perkembangan hingga menciptakan suatu pendekatan yang baru yang memiliki sifat pasca-strukturalis atau *post structuralist*. Dalam pendekatan tersebut, gagasan tentang *equilibrium ecology*, *environmental orthodox* dan *balance of nature* termasuk dalam sasaran kritik. Terdapat konsep yang tidak berkenaan dengan perspektif post-strukturalisme yaitu konsep *environmental orthodox* serta *environmental adaptation* karena tidak sedikit pada kalangan ortodok yang mengabaikan usaha apa saja yang dilakukan oleh para masyarakat yang berpindah ladang seperti dalam beradaptasi pada lingkungan yang mengalami perubahan. Pada akhirnya para kalangan tersebut memberi anggapan bahwasanya masyarakat yang berpindah landang merupakan akar permasalahan lingkungan. Menurut Forsyth dalam (Satria, 2015) menjelaskan bahwasanya *critical political ecology* perlu dikembangkan karena sebagai bentuk politik ekologi atau *politics of ecology* untuk menjadi legitimasi ilmiah terhadap kebijakan lingkungan. Karena pada hal ini Forsyth melihat kelemahan yang terkandung dalam pendekatan ekologi.

Karena pada hakikatnya membedakan antara prinsip politik dengan prinsip ekologi akan menimbulkan permasalahan. Karena sejatinya, jika hanya berdasarkan pada politik maka pada kebijakan lingkungan tidak akan mampu untuk menyinggung faktor biofisik pada permasalahan lingkungan, sehingga kebijakannya dibuat tidak akurat. Sebaliknya, jika hanya berdasar pada prinsip lingkungan saja maka kebijakan dalam lingkungan akan menimbulkan dampak pada marginalisasi masyarakat lokal sebagai pengguna sumberdaya dengan pembatasan akses dimana hal ini juga membuat batasan pada mata pencaharian masyarakat lokal sehingga menimbulkan kesenjangan.

Kedua pendekatan diatas merupakan sumber sumber adanya pendekatan dibawah ini. Dalam studi ekologi politik mengandung bebarapa pendekatan yang berbeda dengan satu sama lain agar saling melengkapi. Menurut Bryant dan Bailyey (2001) dalam (Satria, 2015) pendekatan yang dijabarkan yang memiliki keterkaitan satu sama lain, yaitu sebagai berikut:

- a) Pendekatan yang memiliki tumpuan kepada permasalahan lingkungan yang secara spesifik pijakannya adalah sebuah perspektif atau bidang kajian *traditional geography* yang memiliki keterkaitan dengan bentuk usaha untuk memahami dampak yang ditimbulkan oleh manusia terhadap lingkungan fisik.
- b) Pendekatan yang memiliki tumpuan pada presepsi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan ekologi politik, yaitu mempelajari konstruksi-konstruksi terhadap konsep-konsep tersebut.
- c) Pendekatan yang memandang keterkaitan antara politik dengan permasalahan ekologis dalam konsep wilayah geografis tertentu,

misalnya pada pembelajaran permasalahan pada lingkungan di Afrika, Asia, dan lainnya.

- d) Pendekatan yang mempelajari bahasan-bahasan ekologi politik yang berkaitan dengan karakteristik sosial ekonomi misalnya gender, etnik maupun kelas.
- e) Pendekatan yang memberi fokus perhatian pada karakteristik, kepentingan dan kegiatan dari para pelaku atau aktor yang terdapat dalam pemahaman konflik politik dan ekologi.

Sedangkan menurut Robbins dalam (Satria, 2015) menganalisis bahwasanya pendekatan ekologi politik dibagi menjadi empat, yaitu sebagai berikut:

- a) Dalam marjinalisasi dan degradasi memiliki isu perubahan yang terjadi pada lingkungan yang berasal dari eksploitasi yang tidak wajar sehingga menyebabkan kemiskinan
- b) Dalam konflik lingkungan, isu yang terkandung yaitu pada akses lingkungan dimana terdapat kelangkaan pada sumber daya yang diakibatkan oleh pemanfaatan oleh elit sosial, swasta atau negara maka dari itu menyebabkan percepatan terjadinya konflik antar kelompok seperti etnik, kelas ataupun gender.
- c) Kontrol serta konservasi dimana hal ini konflik yang timbul berawal dari permasalahan konservasi karena disebabkan oleh tidak adanya peran masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya dan terbaikannya usaha perekonomian dan pada organisasi sosial ekonomi mereka karena hanya demi sebuah konservasi

- d) Pada identitas lingkungan serta gerakan sosial, hal ini seperti perjuangan sosial politik yang sering kali memiliki keterikatan dengan usaha untuk mempertahankan mata pencaharian dan pemeliharaan lingkungan.
- c) Batasan-batasan Ekologi Politik

Banyaknya kerusakan sistem ekologi di berbagai belahan bumi, maka sebuah upaya untuk memperbaikinya. Pada wilayah politik merupakan sebuah awasan yang memerlukan garapan yang lebih intensif. Pada dasarnya, ekologi politik mempunyai dua ruang (Dharmawan, 2007). Pertama, ada ruang pada konflik, di ruang ini proses produksi dan reproduksi kebijakan, hingga keputusan politik, melibatkan berbagai kepentingan dan dilakukan di dalamnya. Kedua, di ruang kekuasaan, otoritas kebijakan menjalankan kebijakan / keputusan yang sebelumnya ditugaskan ke ruang konflik. Watt memberikan batas ekologis *“to understand the complex relations between nature and society through a careful analysis of what one might call the forms of access and control over resources and their of implications for environmental health and sustainable livelihoods”* dijelaskan bahwa subsektor ekologi yang terlibat terbagi menjadi enam yang masing-masing berusaha untuk memiliki kekuasaan, satu atau sebagian darinya yaitu ilmu pengetahuan, kekuasaan, praktek atau operasi kegiatan ekonomi, keadilan, politik, dan tata pengaturan atau *governance*. Pentingnya pembahasan mengenai seberapa jauh tipologi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan serta dampak apa yang ditimbulkan pada kehidupan ekonomi, ekologi, dan sosio yang

merupakan suatu sistem kemasyarakatan serta seperti apa sosio-politik dalam menempuh untuk pendekatan penanganan.

d) Ideologi-Ideologi Ekologi Politik

Dari perspektif pengklasifikasian postmodernisme, dalam aliran materialis, postmodernisme tidak lagi digunakan sebagai dasar dalam melihat segala sesuatu yang saat ini terlibat dalam kegiatan reproduksi dan produksi ekonomi, oleh karena itu menurut Stevis (2000) harus Ada kesadaran baru untuk mengamati masyarakat dan tatanan sosial. Dalam masyarakat yang terkait dengan keberadaan alam (Dharmawan, 2007). Pemberian otonomi yang meluas untuk alam guna mengatur dirinya dan memperjuangkan hak yang seharusnya dapat dilakukan melalui perjuangan politik ekologi yang bermula dari organisasi-organisasi dan gerakan eko-politik yang didukung oleh para pelaku lingkungan. Dalam skema politik untuk menjunjung tinggi lingkungan dimana para aktor pembangunan serta praktisi politik pembangunan seharusnya mengetahui bahwasanya terdapat *ecological right* dimana hal hal hak-hak politik lingkungan atau alam merupakan sebuah tambahan dari *traditional political rights, sosial rights and economic rights* yang telah dikenal lebih dulu. Gagasan pro ekologi seperti ini diberikan dorongan kuat oleh mereka yang menganut ideologi politik ekologisme.

c. Pembangunan Berkelanjutan

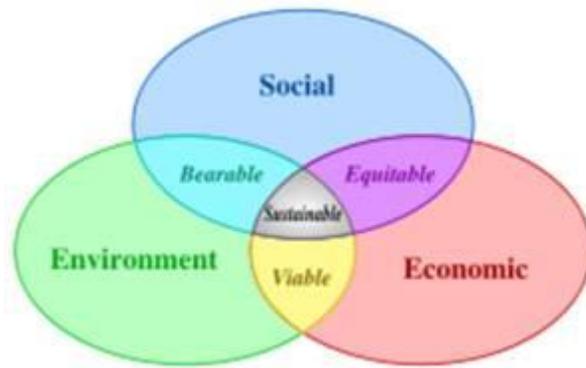
a. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan

Dalam perkembangannya *Sustainable development* atau yang sering disebut pembangunan berkelanjutan memiliki berbagai definisi. Berdasar pada

President's Council on Sustainable Development in the United States as (USEPA,2013), pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang dapat meningkatkan taraf ekonomi, melindungi lingkungan dan kondisi sosial, serta memberi manfaat bagi generasi mendatang. Tidak hanya untuk saat ini, tapi juga untuk generasi yang akan datang.

b. Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Agenda pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Konferensi Dunia yang diadakan di Johannesburg pada tahun 2002 menegaskan kembali komitmen dunia terhadap pembangunan berkelanjutan. Pertemuan tersebut diadakan untuk membuat persetujuan terkait rencana yang dibuat Johannesburg untuk mengimplementasikan apa saja nilai-nilai terkait keberlanjutan yang ada di pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam pembangunan berkelanjutan ditandai dengan adanya tiga pilar tersebut. Dalam pembangunan berkelanjutan berupaya meningkatkan kesetaraan dalam pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial dalam sistem pembangunan berkelanjutan yang saling berhubungan. Berawal dari pemikiran sistem, muncul konsep pembangunan berkelanjutan, dalam contoh ini definisi pembangunan berkelanjutan adalah memiliki keterkaitan satu sama lain antara ruang dengan waktu. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan bertumpu pada pendekatan sistematis dasar yang berupaya memahami interaksi tiga pilar (sosial, ekonomi dan lingkungan) untuk menciptakan konsekuensi yang lebih baik bagi tindakan kita.



Gambar 1. 1 Tiga Pilar Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan

Sumber : (Bockish dalam Cocon, 2012)

1. Pilar Lingkungan

- Jasa ekosistem dapat memberikan perlindungan, keberlanjutan dan meningkatkan kualitas lingkungan ekosistem dan habitat, seperti dampak rekahan hidrolik.
- Teknologi dan zat kimia yang tidak berbahaya bagi lingkungan, yaitu pembuatan produk dan proses kimia untuk meminimalisir bahaya pada kimia, menggunakan kembali atau mendaur ulang untuk yang berbahaya kimia, meminimalisir efek buruk kimia, dan menyesuaikan kandungan bahan. Misalnya akibat keterkaitan antara aktivitas manusia dengan lingkungan.
- Kualitas udara mengacu pada pembuatan dan pemeliharaan standar kualitas udara yang berisiko terjadinya pencemaran udara. Misalnya, strategi pengurangan emisi gas.
- Kualitas pada air berarti meminimalisir dampak buruk pada pencemaran air minum dan memberikan perlindungan pada sumber

air, misalnya pada ekosistem air atau hal lain yang berhubungan dengan air.

- Meminimalisir jumlah dari dampak stres pada masyarakat seperti emisi gas rumah kaca dan dampak pada ekosistem (seperti nasib partikel-partikel kecil yang termodifikasi dalam media air).
- Mengenai integritas sumber daya, yaitu meminimalisir dan membersihkan kecelakaan atau kerusakan, mengurangi efek berbahaya dari penurunan limbah, menambah peningkatan pada daur ulang, memberikan jaminan untuk pengelolaan limbah yang tepat, dan meningkatkan sumber daya.

2. Pilar Ekonomi

- *Pekerjaan* : Membangun atau melindungi pekerjaan pada saat ini ataupun dimasa yang akan datang.
- *Insentif* : Kembangkan insentif yang terkait erat dengan sifat manusia untuk mempromosikan tindakan berkelanjutan (seperti rencana pelestarian, konservasi, dan promosi praktik penebangan berkelanjutan).
- *Supply and demand* : Menaikkan harga atau memberikan perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesehatan lingkungan.
- *Perhitungan sumber daya alam* : Dalam analisis biaya-manfaat, depresiasi modal alam dimasukkan dalam indikator akuntansi dan jasa ekosistem (seperti produk domestik yang berwawasan lingkungan).

- Anggaran ; Efek baik dari anggaran layanan, proses, dan produk seperti untuk menghilangkan anggaran pada regulasi mereka bisa mengembangkan proses bebas limbah
- Nilai : Memperkenalkan format biaya yang memberi sumbangan pada eksternalitas produksi

3. Pilar Sosial

- Keadilan lingkungan : Dengan memberikan penguatan kepada masyarakat dalam mengambil keputusan yang berguna memberi peningkatan pada kesehatan dan pada lingkungan sekitar mereka. Seperti dengan membangun kerjasama dengan organisasi lokal atau adat lokal, suku, atau federal yang berguna dalam pencapaian kesehatan masyarakat dan memiliki berkelanjutan, menjaga kesehatan populasi yang sangat tercemar.
- Kesehatan manusia : Memberi penjagaan, pertahanan, dan memberikan perkembangan kesehatan pada manusia misalnya dalam parameterisasi model yang digunakan untuk memprediksi perkembangan toksikologi.
- Partisipasi : Dalam partisipasi ialah dengan cara menggunakan proses transparan dan terbuka yang berkaitan dengan pemangku kepentingan (misalnya seperti meningkatkan database pada pestisida untuk mengurangi ancaman produk yang biasa digunakan.
- Pendidikan : Memberikan kemajuan untuk segala kalangan masyarakat atau para pemangku kepentingan, masyarakat umum atau bagi mereka yang memiliki potensi besar terkena dampak. Hal

ini diberikan dalam bentuk menyediakan kesempatan untuk anak-anak yang belajar tentang keberlanjutan

- Keamanan sumber daya : Menjaga, melestarikan serta memperbaiki akses yang tertuju pada sumber daya dasar (misalnya, tanah, energi, dan makanan sehingga dapat memahami dampak dari kombinasi yang terjadi di atas saluran air yang alami atau dispresant..
- Masyarakat yang memiliki berkelanjutan : Memperkenalkan kepada masyarakat terkait, perencanaan, pembangunan atau kreatifitas dari masyarakat hingga perkembangan untuk memberi penjelasan seperti apa hidup yang berkelanjutan seperti membangun bangunan hijau

1.7. Definisi Konseptual

1) Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan bentuk kerja sama antar pemerintah atau non-pemerintahan, dalam proses pengambilan keputusan mereka berorientasi pada konsensus dan musyawarah. Collaborative governance dapat dilakukan apabila mereka memiliki visi dan tujuan yang sama secara bersama dimana jika bekerja sendiri sulit untuk diwujudkan.

2) Ekologi Politik

Ekologi Politik merupakan keterpaduan antara lingkungan dengan politik. Lebih mudahnya, ekologi politik merupakan sebuah kajian yang mempelajari terkait aspek sosial politik dalam pengelolaan lingkungan. Sehingga ekologi lingkungan merupakan gabungan dimana sebuah kebijakan politik yang mementingkan gerakan lingkungan atau secara

umum, ekologi politik terfokus pada pemahaman politik terhadap perubahan serta kerusakan pada lingkungan.

3) Pembangunan berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan untuk mencukupi kepentingan pada masa kini tanpa mengurangi kuantitas untuk kepentingan generasi mendatang guna mencukupi kebutuhan mereka. Pembangunan berkelanjutan juga merupakan sebuah sudut pandang dimana kegiatan yang dilakukan secara sistematis serta memiliki rencana yang matang untuk memberikan keseimbangan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

1.8. Definisi Operasional

Tabel 1. 2 Definisi Operasional

No	Teori	Konsep	Indikator
1	Collaborative Governance	Proses dari struktur jejaring organisasi lintas sektoral untuk membuat keputusan, tujuan, pencapaian bersama yang bersifat saling menguntungkan dalam mencapai tujuannya.	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat partisipasi para pemangku kepentingan b. Pembagian akuntabilitas c. <i>Information Sharing</i> / saling berbagi informasi d. Jenis struktur jaringan e. Komitmen terhadap tujuan f. <i>Governance</i> g. Akses terhadap kekuasaan

			h. Akses terhadap sumberdaya
2	Ekologi Politik	Kondisi sosial politik yang melingkupi penyebab, pengalaman dan penanganan masalah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Degradasi dan marjinalisasi lingkungan hidup b. Isu konflik lingkungan c. Konservasi dan kontrol d. Kemunculan dan gerakan sosial
3	Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan dalam perspektif jangka panjang	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengurangan resiko dampak terhadap lingkungan b. Mempertimbangkan kepentingan jangka panjang c. Pendayagunaan sumber energi yang terbarukan

1.9. Metode Penelitian

Metode merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan, dan penelitian merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan akhir atau melaksanakan metode penelitian. Oleh karena itu, metode penelitian merupakan salah satu tahapan untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu menemukan sebab dan akibat dari fenomena atau masalah tersebut.

1) Jenis penelitian.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Creswell (2016), metode penelitian ini mengeksplorasi dan memahami maksud dari sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif sering digunakan dalam penelitian tentang kehidupan masyarakat, tingkah laku, sejarah dan lain-lain.

2) Data dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini ada 2, yaitu data Primer dan Sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan bagian penting dalam proses penelitian, dimana data primer dianggap sebagai data yang paling akurat karena data yang disajikan secara terperinci (Indriantoro, 2011). Data primer juga merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan atau dari narasumber. Data yang kaitkan tentunya berhubungan dengan variabel variabel penelitian yang sejak awal telah ditentukan. Fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta melakukan collaborative governance dengan tiga kabupaten.

b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiarto (2017) ialah suatu informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber melainkan dari pihak ketiga. Data Sekunder umumnya berupa laporan historis atau catatan yang telah tersusun kedalam arsip atau data dokumenter. Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari lembaga pemerintahan atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Unit Analisis Data

TPA Piyungan yng beralamat di Ngablak, Sitimulyo, Kec.Piyungan,Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792.

4) Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi dilakukan peneliti supaya mengetahui hal yang terjadi dilapangan, apakah pengelolaan yang diberikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta kepada TPA Piyungan sudah baik atau belum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan observasi sebagai kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan langsung oleh peneliti guna penyempurnaan data.

b. Wawancara

Teknik lainnya dalam pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara. Wawancara merupakan teknik untuk mendapatkan data atau informasi dengan cara menyiapkan sejumlah pertanyaan untuk diajukan kepada narasumber dengan tatap muka. Dalam wawancara ini peneliti melibatkan beberapa responden, antara lain

1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLHK
2. Pengurus TPA Piyungan
3. Kepala Dusun Nglengkong, Ngablak dan Banyakan III

c. Dokumentasi

Data dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2012). Dokumentasi adalah salah satu analisa yang dilakukan

peneliti untuk menganalisis data tertulis sekunder yang diperoleh dari buku, dokumentasi, jurnal, bahkan media massa.

5) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang terdapat dalam buku Teori dan Paradigma Penelitian Sosial bahwa terdapat beberapa proses proses yang terdapat dalam metode penelitian kualitatif menurut Miles & Huberman (1992) ialah

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan dan mengukur informasi tentang variabel target secara sistematis, metode ini memungkinkan seseorang menjawab pertanyaan penelitian yang diberikan, menguji hipotesis, dan mengevaluasi hasil.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah sebuah opsi, dengan fokus pada proses penyederhanaan, abstrak, dan transformasi data asli yang dihasilkan oleh catatan tertulis di tempat.

c. Penyajian Data

Dalam penyajian data kegiatan yang biasa dilakukan oleh seorang peneliti yang individu maupun berkelompok yang memiliki tujuan untuk melengkapi dalam perkembangan pembuatan laporan dari hasil penelitian kualitatif/kuantitatif yang telah digunakan, sehingga senantiasa dapat dianalisis sesuai dengan standar keilmiahan.

d. Kesimpulan

Tahap akhir dalam proses analisis data guna memahami makna dan maksud penjelasan yang diperoleh dari kumpulan data penelitian yang telah direduksi dengan cara dibandingkan antara satu dengan yang lain sehingga dapat ditarik

benang merah dari penelitian tersebut sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.